



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 25 Mei 2024

Halaman: 2

TERAS

Penjabat Baru

PENJABAT Wali Kota Yogyakarta mengalami pergantian kembali. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Gubernur DIY Sri Sultan HB X melantik Sugeng Purwanto yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Sekretaris Daerah DIY Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat menggantikan Singgih Raharjo yang masa tugasnya berakhir 21 Mei 2024. Ini adalah kali ketiga Pemkot Yogyakarta dipimpin penjabat hingga diisi wali kota definitif hasil Pilkada bulan November mendatang.

Bukan hanya Kota Yogyakarta, Penjabat Bupati Kulonprogo juga mengalami pergantian dari Ni Made Dwipanti Indrayanti kepada Sita Nurlyatswi, yang menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY. Kulonprogo juga harus dipimpin penjabat bupati hingga tiga kali, karena kebelulan tahapan Pilkada berbarengan dengan Kota, sehingga ada jeda yang cukup panjang untuk memilih kepala daerah definitif.

Para penjabat ini akan bekerja hingga seluruh tahapan Pilkada rampung, berbarengan dengan terpilihnya kepala daerah serentak di DIY. Meski diisi penjabat sementara, namun diharapkan roda pemerintahan di Pemkot Yogyakarta dan Pemkab Kulonprogo berjalan dengan baik. Hanya saja, penjabat yang baru diminta langsung beradaptasi dengan persoalan sampah. Bagi Kota Yogyakarta, penanganan sampah membutuhkan kerja keras serta dukungan banyak pihak, terutama masyarakat untuk bisa mereduksi sampah rumah tangga.

Penjabat yang baru diharapkan turut mendukung netralitas ASN dalam menyongsong Pilkada serentak. Hingga saat ini, partai politik masih melakukan pengaringan bakal calon, sehingga belum bisa diketahui figur-figur yang akan bertanding. Hanya saja, calon petahana dipastikan akan maju kembali, apakah akan berpasangan kembali, atau pisah jalan, semua masih bunya peluang.

Sosok-sosok baru juga banyak bermunculan, entah dengan latar belakang organisasi kemasyarakatan, partai, hingga pensiunan birokrat.

Dibanding Kabupaten Bantul, Sleman dan Gunungkidul, Kota Yogyakarta dan Kulonprogo tidak bersinggungan langsung dengan calon petahana karena dipimpin penjabat sementara. Calon petahana, entah kini menjabat bupati atau wali bupati sebaiknya menjaga marwah pemerintahan, dengan tidak menggunakan fasilitas negara dalam misi kampanyenya. Hal ini sebagai bentuk penghormatan kepada ASN agar tidak tersandera. Netralitas ASN harus dijungjung tinggi, karena mereka telah menandatangani pakta integritas untuk menjauhi korupsi, kolusi dan nepotisme. ***

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005